

# Custodia: Journal of Legal, Political, and Humanistic Inquiry

Vol 1 No 3 March 2026, Hal 283-294  
ISSN: 3123-2116 (Print) ISSN: 3123-2108 (Electronic)  
Open Access: <https://scriptaintelektual.com/custodia>

## Pengaruh Tingkat Pendidikan terhadap Kualitas Kinerja Aparatur Desa Kacangan Kecamatan Tambakrejo Kabupaten Bojonegoro

Akmal Bhagaskara<sup>1\*</sup>, Fitrotun Niswah<sup>2</sup>, Meirinawati<sup>3</sup>, Eva Hany Fanida<sup>4</sup>

<sup>1-4</sup> Universitas Negeri Surabaya, Indonesia  
email: [akmal.22090@mhs.unesa.ac.id](mailto:akmal.22090@mhs.unesa.ac.id)<sup>1</sup>

---

### Article Info :

Received:

04-01-2026

Revised:

25-01-2026

Accepted:

30-01-2026

### Abstract

*This study examines the influence of education level on the quality of performance of village apparatus in Kacangan Village, Tambakrejo District, Bojonegoro Regency. The research employs a quantitative approach using primary data collected from respondents through structured questionnaires. Data analysis was conducted using descriptive statistics and inferential analysis, including simple and multiple linear regression tests. The results indicate that the education level of village apparatus has a positive and significant effect on overall performance quality, particularly on the productivity dimension. The coefficient of determination shows that education level explains a substantial proportion of performance variation among village apparatus. However, further analysis reveals that education level does not significantly affect other performance dimensions, namely service quality, responsiveness, responsibility, and accountability. These findings suggest that formal education alone is insufficient to enhance all aspects of village apparatus performance. Organizational systems, work experience, leadership, and institutional control mechanisms play a critical role in shaping service-oriented and accountable performance. Therefore, improving village governance requires an integrated approach that combines education with continuous training and effective organizational management.*

**Keywords:** Education Level, Village Apparatus, Performance Quality, Public Service, Village Governance.

---

### Abstrak

Penelitian ini mengkaji pengaruh tingkat pendidikan terhadap kualitas kinerja aparatur desa di Desa Kacangan, Kecamatan Tambakrejo, Kabupaten Bojonegoro. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data primer yang dikumpulkan dari responden melalui kuesioner terstruktur. Analisis data dilakukan menggunakan statistik deskriptif dan analisis inferensial, termasuk uji regresi linier sederhana dan berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat pendidikan aparatur desa memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas kinerja secara keseluruhan, khususnya pada dimensi produktivitas. Koefisien determinasi menunjukkan bahwa tingkat pendidikan menjelaskan proporsi yang signifikan dari variasi kinerja di antara aparatur desa. Namun, analisis lebih lanjut menunjukkan bahwa tingkat pendidikan tidak secara signifikan mempengaruhi dimensi kinerja lainnya, yaitu kualitas layanan, responsivitas, tanggung jawab, dan akuntabilitas. Temuan ini menyarankan bahwa pendidikan formal saja tidak cukup untuk meningkatkan semua aspek kinerja aparatur desa. Sistem organisasi, pengalaman kerja, kepemimpinan, dan mekanisme kontrol institusional memainkan peran kritis dalam membentuk kinerja yang berorientasi pada layanan dan akuntabel. Oleh karena itu, peningkatkan tata kelola desa memerlukan pendekatan terintegrasi yang menggabungkan pendidikan dengan pelatihan berkelanjutan dan manajemen organisasi yang efektif.

**Kata kunci:** Tingkat Pendidikan, Aparatur Desa, Kualitas Kinerja, Layanan Publik, Tata Kelola Desa.



©2022 Authors.. This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Non Commercial 4.0 International License.  
(<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>)

---

## PENDAHULUAN

Perdebatan global mengenai kualitas tata kelola pemerintahan lokal dalam dua dekade terakhir semakin menempatkan kapasitas sumber daya manusia sebagai determinan utama efektivitas birokrasi publik, terutama pada level pemerintahan paling dekat dengan warga, yakni pemerintahan desa, yang menghadapi tekanan kompleks berupa tuntutan akuntabilitas, transparansi, dan pelayanan publik berbasis kinerja. Reformasi administrasi publik di berbagai negara berkembang menunjukkan bahwa

desentralisasi kewenangan tanpa diimbangi kualitas aparatur yang memadai justru berpotensi melahirkan inefisiensi baru, sebagaimana telah lama dikritisi dalam literatur reformasi birokrasi yang menekankan keterkaitan antara kualitas individu aparatur dan kinerja institusional (Dwiyanto, 2008). Dalam konteks Indonesia, desa tidak lagi dipahami sekadar sebagai unit administratif, melainkan sebagai aktor strategis pembangunan yang dituntut mampu mengelola keuangan, pelayanan kependudukan, dan program pemberdayaan masyarakat secara profesional, sehingga kualitas kinerja aparatur desa menjadi isu struktural yang tidak dapat dipisahkan dari kapasitas pendidikan formal yang mereka miliki (Dinillah & Rodiyah, 2024; Muhi, 2024).

Sejumlah penelitian empiris menunjukkan bahwa kinerja aparatur desa dipengaruhi oleh beragam faktor internal dan eksternal, mulai dari sistem keuangan desa, kompetensi teknis, kepemimpinan kepala desa, hingga sistem informasi sumber daya manusia yang digunakan dalam operasional pemerintahan desa. Studi Felisitas et al. (2023) menegaskan bahwa implementasi SISKEUDES memiliki kontribusi signifikan terhadap kinerja pemerintah desa, namun efektivitas sistem tersebut bergantung pada kemampuan aparatur dalam memahami dan mengoperasikan perangkat administratif yang relatif kompleks. Temuan serupa juga diperkuat oleh Kurniawan et al. (2023) dan Nursin et al. (2023) yang menempatkan kualitas SDM dan pemanfaatan teknologi informasi sebagai faktor kunci kinerja, sementara Iskandar dan Sudirman (2023) menekankan peran kepemimpinan kepala desa dalam mengorkestrasi potensi aparatur. Meskipun demikian, mayoritas studi tersebut cenderung memposisikan pendidikan sebagai variabel implisit yang dilebur ke dalam konsep kompetensi, tanpa membedah secara eksplisit bagaimana tingkat pendidikan formal membentuk kapasitas kognitif, analitis, dan administratif aparatur desa dalam konteks kerja nyata.

Literatur yang lebih spesifik mengenai pengaruh pendidikan terhadap kinerja aparatur desa masih menunjukkan inkonsistensi konseptual dan keterbatasan empiris yang signifikan. Penelitian Haryono et al. (2024) menemukan bahwa pendidikan dan pelatihan berpengaruh positif terhadap kinerja pegawai desa, namun desain penelitian tersebut menggabungkan pendidikan formal dan pelatihan teknis sebagai satu konstruk, sehingga efek independen tingkat pendidikan tidak dapat ditarik secara tegas. Sementara itu, Giawa dan Larosa (2023) mengidentifikasi berbagai faktor yang memengaruhi kinerja perangkat desa, tetapi tidak memberikan penjelasan kausal mendalam mengenai posisi pendidikan dalam hierarki determinan kinerja. Di sisi lain, Haq dan Prabawati (2022) lebih berfokus pada aspek regulatif penilaian kinerja aparatur sipil negara di desa, tanpa mengaitkannya secara sistematis dengan latar belakang pendidikan aparatur sebagai prasyarat kemampuan memahami dan mengimplementasikan kebijakan penilaian kinerja tersebut.

Keterbatasan literatur tersebut menjadi semakin problematis ketika dikaitkan dengan temuan bahwa kualitas kinerja pemerintah desa memiliki implikasi langsung terhadap kesejahteraan masyarakat desa, bahkan berperan sebagai variabel penentu dalam relasi pembangunan lokal yang berkelanjutan. Ndruru et al. (2025) menunjukkan bahwa tingkat pendidikan masyarakat dapat memediasi pengaruh kinerja pemerintah desa terhadap kesejahteraan, namun studi ini justru memperlihatkan paradoks konseptual, karena pendidikan aparatur desa sebagai produsen kebijakan dan layanan tidak ditempatkan sebagai variabel kunci dalam model analisis. Kondisi ini mengindikasikan adanya celah analitis yang krusial, yakni absennya pemahaman yang memadai mengenai bagaimana tingkat pendidikan aparatur desa membentuk kualitas kinerja mereka secara langsung, sebelum dampaknya menjalar ke level kesejahteraan masyarakat dan legitimasi pemerintahan desa.

Urgensi ilmiah dan praktis dari permasalahan ini semakin menguat ketika dikaitkan dengan realitas empiris pemerintahan desa yang masih dihadapkan pada ketimpangan kualitas aparatur, baik antarwilayah maupun dalam satu wilayah yang sama, sebagaimana tercermin dalam variasi kinerja pelayanan administrasi kependudukan dan pengelolaan sumber daya desa (Dinillah & Rodiyah, 2024; Hasibuan et al., 2022). Tanpa pemetaan yang jelas mengenai kontribusi tingkat pendidikan terhadap kinerja aparatur desa, kebijakan pengembangan sumber daya manusia desa berisiko terjebak pada pendekatan administratif jangka pendek yang menekankan pelatihan teknis, tetapi mengabaikan fondasi pendidikan formal sebagai basis pembentukan kemampuan berpikir sistematis, pemahaman regulasi, dan etika kerja birokrasi. Dalam konteks ini, pendidikan tidak sekadar berfungsi sebagai atribut personal aparatur, melainkan sebagai instrumen struktural yang memengaruhi kualitas tata kelola desa secara keseluruhan.

Berdasarkan lanskap keilmuan tersebut, penelitian ini diposisikan untuk mengisi kekosongan konseptual dan empiris dengan menganalisis secara spesifik pengaruh tingkat pendidikan terhadap

kualitas kinerja aparatur Desa Kacangan, Kecamatan Tambakrejo, Kabupaten Bojonegoro, sebagai konteks mikro yang merepresentasikan dinamika pemerintahan desa di Indonesia. Penelitian ini bertujuan menguji secara sistematis hubungan kausal antara pendidikan formal aparatur dan kualitas kinerja mereka, sekaligus memberikan kontribusi teoretis dalam memperjelas posisi pendidikan dalam model kinerja aparatur desa serta kontribusi metodologis melalui pengukuran kinerja berbasis indikator yang kontekstual dan teruji secara empiris, sehingga hasil penelitian diharapkan tidak hanya memperkaya literatur administrasi publik dan pemerintahan desa, tetapi juga menjadi dasar perumusan kebijakan pengembangan aparatur desa yang lebih berbasis bukti.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan desain penelitian lapangan dengan pendekatan kuantitatif asosiatif berjenis korelasional, yang dipilih untuk menguji secara empiris hubungan kausal antara tingkat pendidikan sebagai variabel independen dan kualitas kinerja aparatur desa sebagai variabel dependen melalui pengukuran numerik dan analisis statistik inferensial. Pendekatan ini berangkat dari kerangka teoritik administrasi publik dan manajemen sumber daya manusia yang memandang pendidikan formal sebagai determinan kapasitas kognitif, kemampuan administratif, dan kualitas pengambilan keputusan aparatur, sehingga relevan untuk diuji melalui model kuantitatif berbasis data lapangan. Penelitian dilaksanakan di Desa Kacangan, Kecamatan Tambakrejo, Kabupaten Bojonegoro, yang dipilih secara purposive karena memiliki variasi tingkat pendidikan aparatur desa serta dinamika kinerja pelayanan publik yang masih menunjukkan ketimpangan, menjadikannya konteks empiris yang operasional dan replikatif untuk studi sejenis. Penelitian berlangsung selama periode 15 November hingga 10 Desember 2025, mencakup tahap persiapan instrumen, pengumpulan data lapangan, verifikasi data, serta pengolahan dan analisis statistik secara terstandar untuk menjaga konsistensi prosedural.

Populasi penelitian mencakup seluruh warga Desa Kacangan berusia 18 tahun ke atas sebanyak 1.580 orang, dengan pertimbangan metodologis bahwa kelompok ini merupakan penerima langsung layanan aparatur desa dan memiliki pengalaman empiris yang memadai untuk menilai kualitas kinerja aparatur secara objektif. Penentuan ukuran sampel dilakukan menggunakan rumus Slovin dengan tingkat kesalahan 10 persen, sehingga diperoleh sampel sebanyak 94 responden, sementara teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling dengan kriteria responden pernah berinteraksi langsung dengan pelayanan aparatur desa. Instrumen penelitian berupa kuesioner terstruktur dengan skala pengukuran Likert yang dirancang untuk mengoperasionalisasikan variabel tingkat pendidikan dan kualitas kinerja aparatur desa, diuji validitasnya melalui korelasi item-total dan reliabilitasnya menggunakan koefisien Cronbach's Alpha untuk memastikan konsistensi internal instrumen. Prosedur pengumpulan data dilakukan secara langsung melalui penyebaran kuesioner kepada responden yang memenuhi kriteria, disertai penjelasan tujuan penelitian dan jaminan kerahasiaan data. Data yang terkumpul dianalisis menggunakan perangkat lunak statistik SPSS melalui tahapan analisis deskriptif, uji asumsi statistik, serta analisis korelasional dan regresi linear sederhana sebagai kerangka analitik utama guna menguji kekuatan dan arah pengaruh tingkat pendidikan terhadap kualitas kinerja aparatur desa secara objektif dan terukur.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Tingkat Pendidikan Aparatur Desa sebagai Fondasi Kapasitas Kinerja Pemerintahan Desa**

Tingkat pendidikan aparatur desa merupakan elemen fundamental dalam membentuk kapasitas kelembagaan pemerintahan desa yang adaptif terhadap dinamika regulasi dan tuntutan pelayanan publik. Pendidikan tidak hanya merepresentasikan capaian akademik formal, tetapi juga mencerminkan kemampuan kognitif, penalaran administratif, dan kesiapan aparatur dalam menjalankan fungsi pemerintahan secara profesional. Dalam kerangka birokrasi publik, kualitas pendidikan aparatur menentukan efektivitas implementasi kebijakan serta konsistensi pelayanan kepada masyarakat. Pandangan ini sejalan dengan konsepsi pendidikan sebagai instrumen strategis penguatan kapasitas aparatur negara pada level lokal (Tirtarахardja & Sulo, 2005; Dwiyanto, 2008).

Struktur demografis aparatur desa menjadi konteks penting dalam memahami potensi aktualisasi pendidikan terhadap kinerja pemerintahan desa. Distribusi usia aparatur Desa Kacangan menunjukkan dominasi kelompok usia produktif yang secara psikososial berada pada fase stabil dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan tanggung jawab organisasi. Kondisi ini membuka ruang optimal bagi pendidikan untuk berfungsi sebagai penguat kompetensi kerja dan profesionalisme birokrasi desa.

Gambaran karakteristik usia aparatur desa disajikan secara rinci pada Tabel 1 sebagai dasar analisis kapasitas sumber daya manusia penelitian ini.

**Tabel 1. Data Usia Responden**

Rentang Usia	Jumlah	Percentase
18–25	22	23,4%
26–35	23	24,5%
36–55	41	43,6%
56–65	8	8,5%

Dominasi aparatur pada rentang usia 36–55 tahun menunjukkan keberadaan sumber daya manusia yang matang secara pengalaman dan relatif stabil secara emosional. Pada fase ini, pendidikan berfungsi sebagai instrumen penguatan kapasitas analitis dan pemahaman prosedural dalam menghadapi kompleksitas administrasi desa. Aparatur pada kelompok usia tersebut cenderung mampu mengintegrasikan pengalaman kerja dengan pengetahuan formal yang diperoleh melalui pendidikan. Temuan ini memperkuat argumen bahwa pendidikan dan usia produktif merupakan kombinasi strategis dalam peningkatan kinerja aparatur desa (Muhi, 2024; Wahyudi, 2022).

Dimensi pertama tingkat pendidikan yang dianalisis adalah **jenjang pendidikan formal** aparatur desa sebagai indikator dasar kapasitas intelektual birokrasi desa. Jenjang pendidikan mencerminkan tingkat penguasaan pengetahuan umum, kemampuan berpikir sistematis, serta kesiapan aparatur dalam memahami regulasi pemerintahan. Hasil pengukuran menunjukkan bahwa jenjang pendidikan aparatur Desa Kacangan berada pada kategori kuat berdasarkan persepsi responden. Distribusi skor jenjang pendidikan tersebut disajikan pada Tabel 2.

**Tabel 2. Skor Jawaban Poin Analisis Jenjang Pendidikan (X1)**

Item	Jumlah	Percentase	Kategori
X1.1	340	72,3%	Kuat
X1.2	354	75,3%	Kuat
X1.3	363	77,2%	Kuat
<b>Total X1</b>	<b>1.057</b>		

Kekuatan jenjang pendidikan aparatur desa tersebut mencerminkan kesiapan dasar dalam memahami regulasi dan prosedur kerja pemerintahan. Pendidikan formal berkontribusi pada kemampuan aparatur dalam menafsirkan kebijakan serta mengimplementasikan aturan secara konsisten. Aparatur dengan jenjang pendidikan yang lebih tinggi umumnya memiliki daya analisis lebih baik dalam menyelesaikan permasalahan administratif. Temuan ini sejalan dengan penelitian yang menegaskan bahwa tingkat pendidikan memiliki korelasi positif dengan efektivitas kerja aparatur pemerintahan desa (Rizqianti & Fitriyah, 2022; Sitokdana et al., 2025).

Selain jenjang pendidikan, kesesuaian jurusan pendidikan menjadi indikator penting dalam menilai relevansi kapasitas aparatur terhadap tuntutan kerja pemerintahan desa. Jurusan pendidikan berkaitan langsung dengan keselarasan keilmuan dan kompetensi teknis yang dibutuhkan dalam pengelolaan administrasi desa. Aparatur dengan latar belakang pendidikan yang relevan memiliki kecenderungan lebih adaptif terhadap sistem kerja birokrasi. Hasil pengukuran indikator jurusan pendidikan disajikan pada Tabel 3.

**Tabel 3. Skor Jawaban Poin Analisis Jurusan (X2)**

Item	Jumlah	Percentase	Kategori
X2.1	358	76,1%	Kuat
X2.2	360	76,5%	Kuat
X2.3	361	76,8%	Kuat
<b>Total X2</b>	<b>1.079</b>		

Hasil tersebut menunjukkan bahwa relevansi jurusan pendidikan aparatur desa dinilai kuat dalam mendukung pelaksanaan tugas pemerintahan. Keselarasan keilmuan mempermudah aparatur dalam memahami mekanisme administrasi dan prosedur pelayanan publik. Aparatur dengan latar belakang pendidikan yang sesuai cenderung memiliki efisiensi kerja dan ketepatan pengambilan keputusan. Temuan ini menguatkan pandangan bahwa relevansi pendidikan merupakan faktor strategis dalam peningkatan kapasitas aparatur desa (Giawa & Larosa, 2023; Kurniawan et al., 2023).

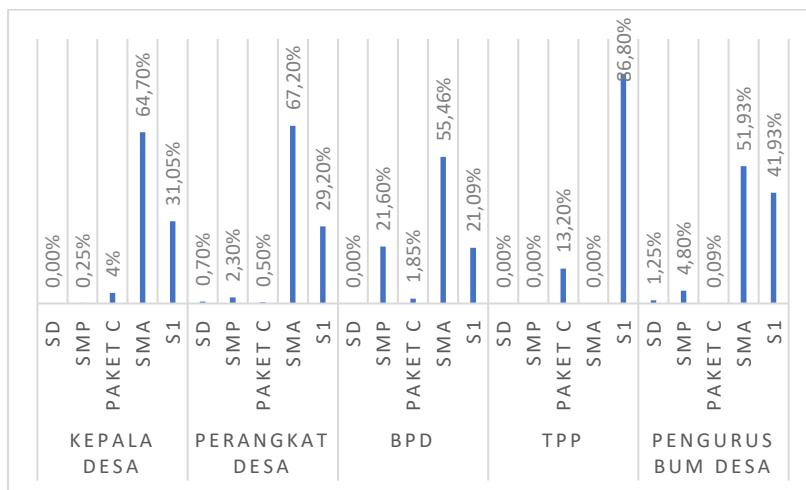
Dimensi ketiga tingkat pendidikan adalah kompetensi yang terbentuk melalui proses pendidikan formal dan pengalaman belajar terstruktur. Kompetensi mencakup kemampuan teknis, pemahaman prosedural, serta keterampilan analitis yang relevan dengan tugas aparatur desa. Pendidikan berperan sebagai fondasi pembentukan kompetensi dasar yang kemudian diaktualisasikan dalam praktik kerja. Skor kompetensi aparatur desa disajikan pada Tabel 4.

**Tabel 4. Skor Jawaban Poin Analisis Kompetensi (X3)**

Item	Jumlah	Percentase	Kategori
X3.1	353	75,1%	Kuat
X3.2	372	79,1%	Kuat
X3.3	369	78,5%	Kuat
<b>Total X3</b>	<b>1.094</b>		

Tingginya skor kompetensi menunjukkan bahwa pendidikan aparatur desa berkontribusi nyata terhadap penguatan kemampuan kerja pemerintahan desa. Kompetensi yang terbentuk memungkinkan aparatur menjalankan tugas secara mandiri, sistematis, dan bertanggung jawab. Aparatur yang kompeten cenderung lebih mampu mengelola beban kerja administratif dan pelayanan publik secara konsisten. Temuan ini selaras dengan penelitian yang menegaskan peran pendidikan dan kompetensi dalam peningkatan kinerja aparatur desa (Haryono et al., 2024; Sulistio et al., 2023).

Secara visual, distribusi tingkat pendidikan aparatur desa di Kabupaten Bojonegoro memperlihatkan pola yang mendukung temuan kuantitatif penelitian ini. Visualisasi tersebut memperkuat pemahaman mengenai posisi pendidikan aparatur desa dalam struktur pemerintahan lokal. Penyajian grafis membantu menegaskan bahwa pendidikan merupakan fondasi kapasitas birokrasi desa. Gambaran tersebut disajikan pada Gambar 1.



**Gambar 1. Tingkat Pendidikan Aparatur Desa di Kabupaten Bojonegoro (2023)**

Sumber: DPMD Kabupaten Bojonegoro, diolah peneliti 2025

Hasil pembahasan ini menunjukkan bahwa tingkat pendidikan aparatur Desa Kacangan berada pada kategori kuat dilihat dari aspek jenjang, jurusan, dan kompetensi. Pendidikan berfungsi sebagai fondasi pembentukan kapasitas aparatur desa dalam menjalankan fungsi pemerintahan dan pelayanan

publik. Kondisi ini menegaskan bahwa penguatan kinerja aparatur desa tidak dapat dilepaskan dari kualitas pendidikan yang terstruktur dan relevan. Argumentasi ini sejalan dengan berbagai kajian yang menempatkan pendidikan sebagai pilar utama reformasi birokrasi dan peningkatan kinerja pemerintahan desa (Dwiyanto, 2008; Dinillah & Rodiyah, 2024).

### **Kualitas Kinerja Aparatur Desa Kacangan sebagai Representasi Pelayanan Publik Desa**

Kualitas kinerja aparatur desa merupakan indikator utama keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan desa yang berorientasi pada pelayanan publik dan tata kelola administratif yang akuntabel. Kinerja aparatur tidak hanya dipahami sebagai pencapaian output kerja, melainkan juga mencakup kualitas proses, kepatuhan terhadap regulasi, serta kemampuan merespons kebutuhan masyarakat secara tepat. Dalam perspektif administrasi publik, kinerja aparatur desa menjadi refleksi langsung dari kapasitas sumber daya manusia dalam mengimplementasikan kewenangan pemerintahan desa (Dwiyanto, 2008; Wicaksono & Ilyas, 2022). Oleh karena itu, analisis kinerja aparatur desa perlu dilakukan secara multidimensional agar mampu menggambarkan kondisi empirik secara komprehensif.

Penelitian ini mengukur kualitas kinerja aparatur desa melalui lima dimensi utama, yaitu produktivitas, kualitas layanan, responsivitas, responsibilitas, dan akuntabilitas. Kelima dimensi tersebut dipilih karena merepresentasikan standar kinerja sektor publik yang menekankan efektivitas kerja, orientasi pelayanan masyarakat, serta kepatuhan terhadap norma administratif dan hukum (Dwiyanto, 2008; Umam & Setiyowati, 2023). Pengukuran dilakukan berdasarkan persepsi responden masyarakat sebagai penerima langsung layanan aparatur desa, sehingga hasil yang diperoleh mencerminkan evaluasi kinerja dari sudut pandang publik. Pendekatan ini relevan dengan kajian kinerja pemerintahan desa yang menempatkan masyarakat sebagai aktor evaluatif utama (Dinillah & Rodiyah, 2024).

Dimensi pertama kualitas kinerja aparatur desa yang dianalisis adalah produktivitas kerja. Produktivitas dipahami sebagai kemampuan aparatur dalam menyelesaikan tugas sesuai dengan target waktu, volume pekerjaan, dan standar administratif yang telah ditetapkan. Produktivitas mencerminkan efisiensi kerja serta kapasitas aparatur dalam mengelola beban tugas pemerintahan desa yang semakin kompleks. Hasil pengukuran produktivitas aparatur desa ditunjukkan pada Tabel 5 berikut.

**Tabel 5. Skor Jawaban Poin Analisis Produktivitas (Y1)**

<b>Item</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Persentase</b>	<b>Kategori</b>
Y1.1	339	72,1%	Kuat
Y1.2	358	76,1%	Kuat
Y1.3	356	75,7%	Kuat
<b>Total Y1</b>	<b>1.053</b>		

Skor produktivitas yang berada pada kategori kuat menunjukkan bahwa aparatur desa dimilai mampu menjalankan tugas pemerintahan secara konsisten dan terukur. Aparatur desa relatif mampu menyelesaikan pekerjaan administratif dan pelayanan sesuai dengan harapan masyarakat. Kondisi ini mencerminkan adanya pola kerja yang cukup efektif dalam pelaksanaan fungsi pemerintahan desa. Temuan tersebut sejalan dengan penelitian Haryono et al. (2024) dan Sitokdana et al. (2025) yang menegaskan bahwa produktivitas aparatur desa merupakan fondasi utama kualitas kinerja organisasi pemerintahan lokal.

Dimensi kedua kualitas kinerja aparatur desa adalah kualitas layanan publik. Kualitas layanan berkaitan dengan ketepatan prosedur, kejelasan informasi, keramahan sikap, serta konsistensi aparatur dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dalam konteks desa, kualitas layanan menjadi aspek yang paling langsung dirasakan oleh warga sebagai penerima layanan administratif. Persepsi responden terhadap kualitas layanan aparatur desa disajikan pada Tabel 6.

**Tabel 6. Skor Jawaban Poin Analisis Kualitas Layanan (Y2)**

<b>Item</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Persentase</b>	<b>Kategori</b>
Y2.1	367	78,0%	Kuat

Y2.2	354	75,3%	Kuat
Y2.3	358	76,1%	Kuat
<b>Total Y2</b>	<b>1.079</b>		

Hasil pengukuran menunjukkan bahwa kualitas layanan aparatur desa berada pada kategori kuat berdasarkan persepsi responden. Aparatur desa dinilai cukup profesional dalam memberikan pelayanan yang sesuai prosedur dan kebutuhan masyarakat. Meskipun demikian, variasi skor antaritem menunjukkan adanya ruang perbaikan pada aspek konsistensi layanan. Temuan ini mendukung kajian Dinillah dan Rodiyah (2024) serta Wahyudi (2022) yang menekankan bahwa kualitas layanan publik desa sangat ditentukan oleh perilaku dan kapasitas aparatur dalam berinteraksi dengan masyarakat.

Dimensi ketiga kualitas kinerja aparatur desa adalah responsivitas terhadap kebutuhan dan keluhan masyarakat. Responsivitas mencerminkan kemampuan aparatur desa dalam merespons permohonan layanan, pengaduan, dan dinamika sosial secara cepat dan tepat. Dalam tata kelola pemerintahan desa, responsivitas menjadi indikator penting dari orientasi pelayanan publik. Hasil analisis responsivitas aparatur desa ditampilkan pada Tabel 7.

**Tabel 7. Skor Jawaban Poin Analisis Responsivitas (Y3)**

<b>Item</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Percentase</b>	<b>Kategori</b>
Y3.1	356	75,7%	Kuat
Y3.2	359	76,3%	Kuat
Y3.3	347	73,8%	Kuat
<b>Total Y3</b>	<b>1.062</b>		

Skor responsivitas yang berada pada kategori kuat menunjukkan bahwa aparatur desa relatif tanggap terhadap kebutuhan masyarakat. Aparatur dinilai cukup cepat dalam merespons permohonan layanan dan memberikan solusi administratif. Namun, perbedaan skor antaritem mengindikasikan adanya variasi tingkat responsivitas dalam situasi tertentu. Temuan ini sejalan dengan penelitian Iskandar dan Sudirman (2023) serta Wahyudi et al. (2022) yang menegaskan bahwa responsivitas aparatur desa merupakan prasyarat penting bagi efektivitas pelayanan publik.

Dimensi keempat kualitas kinerja aparatur desa adalah responsibilitas. Responsibilitas berkaitan dengan tingkat kepatuhan aparatur terhadap aturan, prosedur kerja, serta batas kewenangan yang dimiliki. Responsibilitas mencerminkan integritas administratif aparatur dalam menjalankan tugas pemerintahan desa. Persepsi responden terhadap responsibilitas aparatur desa disajikan pada Tabel 8.

**Tabel 8. Skor Jawaban Poin Analisis Responsibilitas (Y4)**

<b>Item</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Percentase</b>	<b>Kategori</b>
Y4.1	363	77,2%	Kuat
Y4.2	359	76,3%	Kuat
<b>Total Y4</b>	<b>722</b>		

Kategori kuat pada dimensi responsibilitas menunjukkan bahwa aparatur desa dinilai cukup patuh terhadap aturan dan prosedur kerja. Aparatur cenderung menjalankan tugas sesuai dengan kewenangan yang dimiliki dan tidak menyimpang dari ketentuan administratif. Kondisi ini mencerminkan adanya kesadaran normatif dalam pelaksanaan pemerintahan desa. Temuan ini sejalan dengan Haq dan Prabawati (2022) serta Sulistio et al. (2023) yang menekankan pentingnya kepatuhan regulatif dalam kinerja aparatur pemerintahan desa.

Dimensi terakhir kualitas kinerja aparatur desa adalah akuntabilitas. Akuntabilitas mencerminkan kemampuan aparatur desa dalam mempertanggungjawabkan setiap tindakan, keputusan, dan penggunaan sumber daya kepada masyarakat dan pemerintah yang lebih tinggi. Dalam konteks pemerintahan desa, akuntabilitas menjadi elemen krusial dalam menjaga kepercayaan publik. Hasil pengukuran akuntabilitas aparatur desa ditunjukkan pada Tabel 9.

**Tabel 9. Skor Jawaban Poin Analisis Akuntabilitas (Y5)**

Item	Jumlah	Persentase	Kategori
Y5.1	350	74,4%	Kuat
Y5.2	363	76,3%	Kuat
<b>Total Y5</b>	<b>713</b>		

Akuntabilitas aparatur desa yang berada pada kategori kuat menunjukkan adanya kesadaran tanggung jawab publik dalam pelaksanaan tugas pemerintahan. Aparatur dinilai cukup transparan dan mampu mempertanggungjawabkan pekerjaannya kepada masyarakat. Meski demikian, perbedaan skor antaritem menunjukkan bahwa praktik akuntabilitas masih dapat ditingkatkan. Temuan ini mendukung penelitian Hasibuan et al. (2022) dan Nursin et al. (2023) yang menegaskan bahwa kualitas sumber daya manusia sangat berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja pemerintahan desa.

Kualitas kinerja aparatur Desa Kacangan berada pada kategori kuat di seluruh dimensi yang diukur. Kondisi ini menggambarkan bahwa aparatur desa memiliki kapasitas kerja yang relatif baik dalam menjalankan fungsi pelayanan publik dan administrasi pemerintahan. Variasi skor antar dimensi menunjukkan adanya perbedaan kekuatan kinerja pada aspek tertentu, yang menjadi dasar penting bagi analisis pengaruh pada pembahasan berikutnya. Dengan demikian, Bahasan ini menjadi pijakan empiris yang kokoh untuk menjelaskan hubungan antara tingkat pendidikan dan kualitas kinerja aparatur desa pada analisis selanjutnya (Dwiyanto, 2008; Giawa & Larosa, 2023; Yulistina & Tahwin, 2024).

#### **Pengaruh Tingkat Pendidikan terhadap Dimensi Kualitas Kinerja Aparatur Desa**

Analisis pada bagian ini diarahkan untuk menelaah pengaruh tingkat pendidikan terhadap kualitas kinerja aparatur desa secara inferensial melalui pengujian regresi dan uji statistik lanjutan. Pendekatan ini digunakan untuk memastikan apakah hubungan yang teridentifikasi secara deskriptif memiliki kekuatan hubungan yang signifikan secara statistik. Hasil pengujian menjadi dasar dalam memahami kontribusi tingkat pendidikan terhadap variasi kinerja aparatur desa. Penguatan analisis dilakukan dengan menyajikan data hasil pengolahan langsung dari responden dalam bentuk tabel statistik.

**Tabel 10. Hasil Uji Regresi Linear Sederhana**

Variabel	B	Std. Error	Beta	t	Sig.
Konstanta	4,308	3,229	–	1,334	0,185
Tingkat Pendidikan	1,308	0,093	0,826	14,045	<0,001

Hasil regresi linear sederhana menunjukkan bahwa tingkat pendidikan memiliki pengaruh positif terhadap kualitas kinerja aparatur desa. Nilai koefisien regresi yang tinggi menunjukkan adanya hubungan yang kuat antara variabel independen dan dependen. Signifikansi statistik yang ditunjukkan oleh nilai probabilitas yang sangat kecil menegaskan keberartian pengaruh tersebut. Temuan ini sejalan dengan pandangan bahwa pendidikan berperan dalam membentuk kapasitas kerja dan pola berpikir aparatur (Dwiyanto, 2008; Wahyudi, 2022).

Pengujian lanjutan dilakukan untuk melihat pengaruh masing-masing dimensi tingkat pendidikan terhadap produktivitas kerja aparatur desa. Analisis ini memisahkan kontribusi jenjang pendidikan, jurusan pendidikan, dan kompetensi terhadap dimensi produktivitas sebagai bagian dari kinerja. Pendekatan ini penting untuk mengidentifikasi aspek pendidikan yang memiliki kontribusi dominan. Data empiris disajikan dalam Tabel 11 sebagai dasar interpretasi hasil.

**Tabel 11. Regresi Jenjang Pendidikan, Jurusan, dan Kompetensi terhadap Produktivitas (Y1)**

Variabel	B	Beta	t	Sig.
Jenjang (X1)	0,793	0,880	1,854	0,315
Jurusan (X2)	6,214	0,909	2,184	0,273
Kompetensi (X3)	1,021	0,999	19,417	0,033

Hasil regresi menunjukkan bahwa kompetensi memiliki pengaruh signifikan terhadap produktivitas aparatur desa, sementara jenjang dan jurusan pendidikan tidak menunjukkan signifikansi statistik. Kondisi ini mengindikasikan bahwa kemampuan praktis dan keterampilan kerja lebih menentukan produktivitas dibandingkan latar belakang pendidikan formal semata. Temuan ini memperkuat argumen bahwa efektivitas kerja aparatur desa dipengaruhi oleh kecakapan teknis yang terinternalisasi dalam aktivitas kerja harian. Pandangan serupa juga dikemukakan oleh Haryono et al. (2024) dan Kurniawan et al. (2023).

Pengujian regresi selanjutnya diarahkan pada dimensi kinerja non-produktif yang meliputi kualitas layanan, responsivitas, responsibilitas, dan akuntabilitas. Keempat dimensi ini merepresentasikan aspek tata kelola dan pelayanan publik yang bersifat normatif dan prosedural. Hasil analisis menunjukkan pola yang relatif seragam pada seluruh dimensi tersebut. Ringkasan hasil pengujian disajikan dalam Tabel 12–15.

**Tabel 12. Ringkasan Regresi Tingkat Pendidikan terhadap Dimensi Kinerja Y2–Y5**

Dimensi Kinerja	Arah Koefisien	Signifikansi
Kualitas Layanan (Y2)	Negatif	Tidak signifikan
Responsivitas (Y3)	Negatif	Tidak signifikan
Responsibilitas (Y4)	Negatif	Tidak signifikan
Akuntabilitas (Y5)	Negatif	Tidak signifikan

Temuan ini menunjukkan bahwa tingkat pendidikan tidak memberikan pengaruh langsung terhadap dimensi pelayanan dan tata kelola aparatur desa. Dimensi-dimensi tersebut lebih banyak dipengaruhi oleh mekanisme kerja organisasi, kepemimpinan, serta sistem pengawasan internal. Pendidikan formal belum tentu mampu mengubah perilaku pelayanan tanpa dukungan struktur kelembagaan yang kuat. Hasil ini sejalan dengan temuan Iskandar dan Sudirman (2023) serta Umam dan Setiyowati (2023).

Pengujian parsial melalui uji t dilakukan untuk menegaskan kembali pengaruh tingkat pendidikan terhadap kinerja aparatur desa. Hasil uji ini menjadi indikator utama dalam menilai signifikansi individual variabel independen. Nilai statistik yang dihasilkan menunjukkan konsistensi dengan hasil regresi sebelumnya. Data hasil uji t disajikan pada Tabel 16.

**Tabel 13. Hasil Uji t**

Variabel	t hitung	Sig.
Tingkat Pendidikan	14,045	<0,001

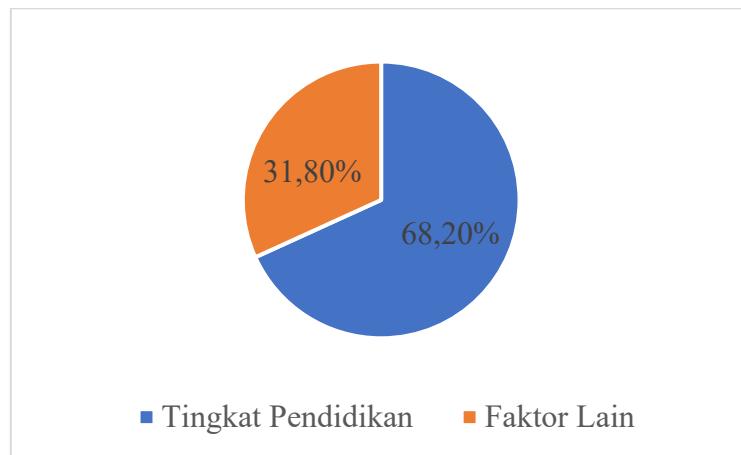
Nilai t hitung yang jauh lebih besar dari nilai kritis menunjukkan bahwa tingkat pendidikan memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja aparatur desa secara keseluruhan. Signifikansi ini menegaskan bahwa pendidikan tetap menjadi faktor fundamental dalam membentuk kualitas kerja aparatur. Namun, pengaruh tersebut tidak terdistribusi secara merata pada seluruh dimensi kinerja. Hal ini menunjukkan adanya diferensiasi peran pendidikan dalam aspek produktif dan non-produktif kinerja aparatur.

Besarnya kontribusi tingkat pendidikan terhadap variasi kinerja aparatur desa dianalisis melalui koefisien determinasi. Nilai determinasi memberikan gambaran mengenai proporsi variasi variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variabel independen. Hasil pengujian menunjukkan tingkat kontribusi yang relatif tinggi. Data koefisien determinasi disajikan dalam Tabel 17.

**Tabel 14. Hasil Uji Koefisien Determinasi**

R	R Square	Adjusted R Square
0,826	0,682	0,678

Nilai koefisien determinasi menunjukkan bahwa tingkat pendidikan menjelaskan sebagian besar variasi kinerja aparatur desa. Sisa variasi kinerja dipengaruhi oleh faktor lain di luar model penelitian, seperti kepemimpinan, budaya kerja, dan sistem organisasi. Temuan ini menegaskan bahwa pendidikan merupakan faktor penting namun tidak berdiri sendiri dalam meningkatkan kinerja aparatur desa. Ilustrasi hubungan antara tingkat pendidikan dan kualitas kinerja aparatur desa disajikan dalam Gambar 2 sebagai penguatan visual atas temuan empiris penelitian.



**Gambar 1. Persentase Pengaruh Tingkat Pendidikan Terhadap Kualitas Kinerja**  
(Sumber: Data primer diolah peneliti, 2026)

Gambar 2 menunjukkan bahwa pengaruh tingkat pendidikan terhadap kinerja aparatur desa tidak berlangsung secara merata pada seluruh dimensi kinerja. Pendidikan terbukti lebih berperan dalam meningkatkan produktivitas, sementara kualitas layanan, responsivitas, responsibilitas, dan akuntabilitas tidak menunjukkan hubungan yang signifikan. Pola ini menegaskan bahwa pendidikan formal belum sepenuhnya menentukan kualitas perilaku pelayanan dan tata kelola aparatur desa. Temuan tersebut menguatkan perlunya dukungan sistem kerja dan pengembangan kapasitas aparatur di luar pendidikan formal.

## KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat pendidikan aparatur desa memiliki peran penting dalam membentuk kualitas kinerja aparatur Desa Kacangan, Kecamatan Tambakrejo, Kabupaten Bojonegoro, terutama pada aspek produktivitas kerja. Hasil pengujian statistik memperlihatkan bahwa tingkat pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja aparatur secara umum, dengan kontribusi penjelasan yang relatif kuat terhadap variasi kinerja aparatur desa. Namun, ketika dianalisis secara parsial pada dimensi kualitas layanan, responsivitas, responsibilitas, dan akuntabilitas, pengaruh tingkat pendidikan tidak menunjukkan signifikansi statistik. Temuan ini mengindikasikan bahwa pendidikan formal berfungsi sebagai modal dasar peningkatan kapasitas kerja, tetapi efektivitas pelayanan publik dan tata kelola aparatur desa juga sangat dipengaruhi oleh faktor struktural, sistem kerja, pengalaman, serta mekanisme pengawasan kelembagaan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Dinillah, R. R., & Rodiyah, I. (2024). Kinerja Aparatur Desa dalam Pelayanan Administrasi Kependudukan di Desa Watesari. *NeoRespublica: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 5(2), 646-661. <https://doi.org/10.52423/neores.v5i2.217>
- Dwiyanto, A. (2008). *Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia*. Gadjah Mada University Press.
- Felisitas, L., Mitan, W., & De Romario, F. (2023). Pengaruh Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) Terhadap Kinerja Pemerintah Desa Di Kecamatan Doreng. *Jurnal Mutiara Ilmu Akuntansi*, 1(4), 276-291. <https://doi.org/10.55606/jumia.v1i4.2051>
- Giawa, N., & Larosa, Y. M. (2023). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Perangkat Desa Orsedes Kecamatan Boronadu Kabupaten Nias Selatan. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset*

- Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi, 11(4), 506-515.*  
<https://doi.org/10.35794/emba.v11i4.51489>
- Haq, A. N. N., & Prabawati, I. (2022). Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 Tentang Penilaian Kinerja Aparatur Sipil Negara Di Desa Sepande, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo. *Publika*, 1163-1172. <https://doi.org/10.26740/publika.v10n4.p1163-1172>
- Haryono, A., Purba, T., & Sipayung, T. (2024). Pengaruh Pendidikan Pelatihan, Kompetensi Dan Motivasi Kerja Terhadap Kinerja Pegawai Kantor Desa Di Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Asahan. *Manajemen: Jurnal Ekonomi*, 6(3), 624-638. <https://doi.org/10.36985/6qpw4y69>
- Hasibuan, M. R., Harahap, R. H., & Humaizi, H. (2022). Pengembangan sumber daya manusia dalam meningkatkan kinerja anggota badan permusyawaratan Desa di Desa Mananti Sosa Jae. *Perspektif*, 11(2), 674-691. <https://doi.org/10.31289/perspektif.v11i2.6084>
- Iskandar, I., & Sudirman, I. (2023). Peran Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Meningkatkan Efektivitas Kinerja Perangkat Desa (Studi Kantor Desa Tengkapak Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan). *JUPEIS: Jurnal Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 2(1), 29-41. <https://doi.org/10.57218/jupeis.Vol2.Iss1.441>
- Kurniawan, A. W., Friska, S., Ruma, Z., & Sahabuddin, R. (2023). Pengaruh Sistem Informasi Sumber Daya Manusia, Kompetensi Dan Disiplin Kerja Terhadap Kinerja Aparat Desa Parumpanai. *SINOMIKA Journal: Publikasi Ilmiah Bidang Ekonomi dan Akuntansi*, 2(2), 251-256. <https://doi.org/10.54443/sinomika.v2i2.908>
- Muhi, A. H. (2024). The Contribution of Quality Human Resources of Village Heads to the Achievement of Independent Villages. *Society*, 12(2), 319-330. <https://doi.org/10.33019/society.v12i2.697>
- Ndruru, S., Bangun, N. B., & Razali, M. (2025). Pengaruh Kinerja Pemerintah Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa Dengan Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Sebagai Variabel Mediasi Di Desa Fahandrona Kecamatan Ulugawo Kabupaten Nias. *Jurnal Media Informatika*, 6(3), 1761-1767. <https://doi.org/10.55338/jumin.v6i3.5724>
- Nursin, D., Syamsuddin, S., & Nirwana, N. (2023). Pengaruh kualitas SDM, Pemanfaatan teknologi informasi, sistem pengendalian intern terhadap pengelolaan keuangan dana desa dengan kecerdasan spiritual sebagai variabel moderasi. *Owner: Riset dan Jurnal Akuntansi*, 7(1), 77-101. <https://doi.org/10.33395/owner.v7i1.1359>
- Rizqianti, P. P., & Fitriyah, H. (2022). The Influence of Accounting Understanding, Education Level, and Quality of Village Apparatus Job Training on Understanding Village Financial Reports. *Indonesian Journal of Cultural and Community Development*, 11, 10-21070. <https://doi.org/10.21070/ijccd.v11i0.812>
- Sitokdana, T., Irawan, A., Mustajab, D., Noch, M. Y., & Rumasukun, R. (2025). Pengaruh Pendidikan, Pengalaman Kerja dan Motivasi Dalam Meningkatkan Kinerja Aparatur Sipil Negara Pada Sekertariat Daerah Kabupaten Pegunungan Bintang. *Center of Economic Students Journal*, 8(2), 849-864. <https://doi.org/10.56750/csej.v8i2.1204>
- Sugiyono. (2021). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Sulistio, E. B., Hutagalung, S. S., & Fadoli, M. I. (2023). Analisis Kompetensi Aparatur Pemerintah Desa Dalam Perumusan Kebijakan Desa (Suatu Studi Di Tiyuh Sidomakmur Kabupaten Tulang Bawang Barat). *Administratio*, 14(1), 83-97. <https://doi.org/10.23960/administratio.v14i1.367>
- Tirtarahardja, U., & Sulo, L. (2005). *Pengantar Pendidikan*. Rineka Cipta.
- Umam, M. S., & Setiyowati, A. D. (2023). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Komitmen Aparatur, Kepatuhan Pada Regulasi Terhadap Kinerja Aparatur Daerah. *InFestasi*, 19(1), 91-102. <https://doi.org/10.21107/infestasi.v19i1.19551>
- Wahyudi, A. (2022). Kinerja Aparatur Pemerintah Desa Dalam Pelaksanaan Pelayanan Publik Kepada Masyarakat (Suatu Tinjauan Tingkat Pendidikan Aparatur Pemerintah Desa Ngadisuko Kecamatan Durenan Kabupaten Trenggalek). *Publiciana*, 15(01), 38-48. <https://doi.org/10.36563/publiciana.v15i01.529>
- Wahyudi, D., Marantika, A., & Yusup, Y. (2022). Pengaruh Kepemimpinan, Lingkungan Kerja, Dan Fasilitas Kantor Terhadap Kinerja Perangkat Desa Di Kecamatan Kampar. *Jesya (Jurnal Ekonomi dan Ekonomi Syariah)*, 5(1), 887-898. <https://doi.org/10.36778/jesya.v5i1.658>

- Waruwu, A. I. (2024). Pengaruh Disiplin Dan Motivasi Kerja Terhadap Kinerja Aparatur Desa Di Kecamatan Huruna Kabupaten Nias Selatan. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Nias Selatan*, 7(2), 17-30. <https://doi.org/10.57094/jim.v7i2.1916>
- Wicaksono, E., & Ilyas, S. M. (2022). Analisis Kinerja Aparatur Desa Dalam Memberikan Pelayanan Publik: Studi Kasus Di Desa Karanggeger Kecamatan Pajarakan Kabupaten Probobolinggo. *Jurnal Bina Bangsa Ekonomika*, 15(1), 61-70. <https://doi.org/10.46306/jbbe.v15i1.157>
- Wijaya, H., & Berlianti, D. (2022). Pengaruh Pelatihan Terhadap Kinerja Perangkat Desa Pada Desa Pinang Banjar Kecamatan Sungai Lilin. *Jurnal Manajemen Kompeten*, 4(2), 39-55. <https://doi.org/10.51877/mnjm.v4i2.206>
- YULISTINA, E. S., & TAHWIN, M. (2024). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Pegawai Kelurahan Se Kabupaten Rembang. *Jesya (Jurnal Ekonomi dan Ekonomi Syariah)*, 7(1), 765-777. <https://doi.org/10.36778/jesya.v7i1.1459>